



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

---

# Bab. I Pendahuluan

---

## 1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

### a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana perangkat daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban perangkat daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan perangkat daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan:

- a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan perangkat daerah serta hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana perangkat daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi perangkat daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan perangkat daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021 antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **I. Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.

#### **II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

### **III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

### **IV. Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

### **V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan akun-akun laporan keuangan, dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

### **VI. Penjelasan Informasi Non Keuangan**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

### **VII. Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

## **Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

---

### **2.1. Ekonomi Makro**

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional khususnya di bidang ekonomi dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantul tahun 2021 tercatat Rp 28.090,84 milyar naik 7,37% dari tahun 2020 yang sebesar Rp 26.161,31 milyar dengan distribusi terbesar dari sektor industri pengolahan kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. (BPS, 2022).

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi. Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 yang juga dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
3. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui kas daerah Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Semua belanja Dinas dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dialokasikan berdasarkan urusan, program dan kegiatan kepada perangkat daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang secara



teknis menangani dan mengelola berbagai program kegiatan di bidang Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melaksanakan 6 program sebagai berikut:

- a. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Penatagunaan Tanah;
- f. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

Realisasi pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Target Kinerja DPTR Tahun Anggaran 2021

<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>Program Penataan bangunan dan lingkungannya</b>	<b>Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	persen	100	100	100
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	laporan pengisian konten geoportal	dokumen	1	1	100
<b>Program Penyelenggaraan Penataan ruang</b>	<b>Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
	<b>Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125</b>

<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabuptaen /Kota	Capaian Kinerja Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	persen	100	100	100
Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, onsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota	Raperda RTRW	Dokumen	1	1	100
	Validasi KLHS RTRW	Dokumen	1	1	100
Sub kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Raperda RDTR perkotaan	Dokumen	1	1	100
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100
Sub kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	Dokumen	1	1	100
	publikasi tata ruang	jenis	2	2	100
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten / Kota	persen	100	100	100
Sub kegiatan Sistem Informasi penataan ruang	Laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang	Dokumen	12	12	100
	publikasi data pemanfaatan ruang	Jenis	2	2	100
	Informasi pengendalian pemanfaatan ruang	dokumen	180	180	100
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	persen	100	100	100
Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	Dokumen rekomendasi	1	1	100
	Laporan pengendalian dan pengawasan tata	dokumen	12	12	100

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	ruang				
<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang</b>	<b>Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja perencanaan Tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan Kadipaten	persen	100	100	100
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan ruang startegis kasultanan dan kadipaten	RTBL Kawasan perbukitan parangtritis	dokumen	1	1	100
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>83</b>	<b>81.71</b>	<b>98,44</b>
	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>88</b>	<b>83.45</b>	<b>94,83</b>
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	100	100
Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tiunjangan ASN	Gaji	kali	14	14	100
Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Pengelola Kepegawaian	ob	12	12	100
Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jasa pengelola keuangan	ob	165	165	100
	laporan pengelolaan keuangan dan aset	dokumen	12	12	100
Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi umum perangkat Daerah	persen	100	100	100
Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Alat listrik dan elektronika	jenis	15	15	100
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor	jenis	65	65	100
Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengisian tabung APAR	Tabung	2	2	100
	Pengisian tabung gas	Tabung	6	6	100
	Peralatan dan bahan kebersihan	Jenis	22	22	100
	Gordyn ruangan	Meter	20	20	100

<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	Jenis	9	9	100
	penggandaan	lembar	53.769	53.769	100
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Pembayaran surat kabar	bulan	12	12	100
Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jamuan tamu	Orang	100	75	75
	laporan pelayanan tamu/pengunjung	dokumen	12	12	100
Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	36	36	100
	perjalanan dinas dalam daerah	Op	103	95	92
	perjalanan dinas luar daerah	op	12	10	83
Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Laporan pengelolaan arsip	dokumen	12	12	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100
Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan kantor	jenis	6	6	100
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Materai	lembar	162	162	100
Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Pembayaran telepon, listrik, internet	bulan	12	12	100
Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Publikasi	jenis	4	4	100
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	12	12	100
	Laporan operasional dan perawatan kendaraan	dokumen	12	12	100
Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100
Sub kegiatan	Bahan bakar minyak	Liter	12.320	12.316	99,97

<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jasa KIR, perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	Unit	17	17	100
	jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	unit	17	17	100
Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	6	6	100
Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	Unit	2	2	100
	Teralis Gedung	unit	1	1	100
<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>101,87</b>	<b>101,87</b>
	<b>Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125</b>
Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Capaian kinerja penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	persen	100	87,25	87,25
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Dokumen pendaftaran tanah pemda	Dokumen	50	7	14
	Laporan inventarisasi tanah desa	Dokumen	1	1	100
	Laporan sosialisasi pertanahan	Dokumen	8	8	100
	Pendaftaran tanah warga	Dokumen	10	9	90
	Rekomendasi pemanfaatan SG	Dokumen	5	5	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Konsolidasi tanah	Bidang	32	30	94
	laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	Dokumen	12	12	100
	Laporan sosialisasi pertanahan	dokumen	7	7	100
<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>101,87</b>	<b>101,87</b>
Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan dan tanah	persen	100	83,46	83,46

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	kadipaten				
Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Pemasangan patok dan penunjukan batas tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Bidang	247	247	100
	Pemasangan patok tanah desa	Bidang	1150	1150	100
	Pemberkasan peta bidang tanah desa	Bidang	500	500	100
	Pembuatan patok	Patok	5300	5300	100
	Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	sertifikat	500	237	47
	Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	Bidang	358	230	64
	Pengukuran tanah desa	Bidang	500	-	0
	Peta bidang tanah desa	Bidang	500	433	87
	sket bidang tanah desa	Bidang	1150	1150	100
	verifikasi sertifikat tanah desa	sertifikat	1727	1499	87
Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Rekomendasi Bupati/ Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	rekomendasi	20	20	100
Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Fasilitasi Rekomendasi Bupati/ kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	desa	5	5	100
Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan kabupaten Bantul	Unit komputer	1	1	100

Sumber : DPTR, 2021

## Bab III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ruang lingkup ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan meliputi pos pendapatan dan belanja yang terdapat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Tidak terdapat target pada pos pendapatan dikarenakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tidak memiliki pos pendapatan yang menjadi sumber bagi pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Total pagu anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebesar Rp 10.841.543.465 dengan realisasi 88,29% atau mencapai Rp 9.571.687.906 yang terdiri atas:

Tabel 2. Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Berdasar Kelompok dan Jenis Belanja APBD TA 2021

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.694.443.465</b>	<b>9.425.209.206</b>	<b>88,13</b>	<b>1.269.234.259</b>	<b>11,87</b>
Belanja Pegawai	4.994.488.637	4.557.236.698	91,25	437.251.939	8,75
Belanja Barang dan Jasa	5.699.954.828	4.867.972.508	85,40	831.982.320	14,6
<b>Belanja Modal</b>	<b>147.100.000</b>	<b>146.478.700</b>	<b>99,58</b>	<b>621.300</b>	<b>0,42</b>
Belanja Modal	147.100.000	146.478.700	99,58	621.300	0,42
	<b>10.841.543.465</b>	<b>9.571.687.906</b>	<b>88,29</b>	<b>1.269.855.559</b>	<b>12,13</b>

Sumber : DPTR, 2021

Total belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun anggaran 2021 dengan rincian berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang TA 2021

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN (RP)</b>	<b>%</b>
<b>Program Penataan bangunan dan lingkungannya</b>	<b>49.000.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota	49.000.000	49.000.000	100	0	0
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	49.000.000	49.000.000	100	0	0
<b>Program Penyelenggaraan Penataan ruang</b>	<b>477.436.580</b>	<b>460.170.100</b>	<b>96,38</b>	<b>17.266.480</b>	<b>3,62</b>
Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabuptaen /Kota	190.386.000	189.158.000	99,35	1.228.000	0,65
Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluas, onsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota	117.000.000	117.000.000	100	0	0
Sub kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	73.386.000	72.158.000	98,33	1.228.000	1,67
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	86.277.500	83.976.500	97,33	2.301.000	2,67
Sub kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	86.277.500	83.976.500	97,33	2.301.000	2,67
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi	121.409.340	107.707.140	88,71	13.702.200	11,29



<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN (RP)</b>	<b>%</b>
Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten / Kota					
Sub kegiatan Sistem Informasi penataan ruang	121.409.340	107.707.140	88,71	13.702.200	11,29
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	79.363.740	79.328.460	99,96	35.280	0,04
Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	79.363.740	79.328.460	99,96	35.280	0,04
<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang</b>	<b>245.431.500</b>	<b>245.431.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	245.431.500	245.431.500	100	0	0
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan ruang startegis kasultanan dan kadipaten	245.431.500	245.431.500	100	0	0
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.879.360.637</b>	<b>5.393.767.901</b>	<b>91,74</b>	<b>485.592.736</b>	<b>8,26</b>
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	5.043.834.877	4.606.541.898	91,33	437.292.979	8,67
Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.882.078.637	4.444.826.698	91,04	437.251.939	8,96
Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	2.100.000	2.100.000	100	0	0
Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	159.656.240	159.615.200	99,97	41.040	0,03
Kegiatan Administrasi umum Perangkat	260.160.624	231.007.050	88,79	29.153.574	11,21

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN (RP)</b>	<b>%</b>
Daerah					
Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100	0	0
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.146.610	73.146.600	100	10	0
Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	21.488.500	21.481.000	99,97	7.500	0,03
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.923.274	20.923.250	100	24	0
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	1.200.000	1.200.000	100	0	0
Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	31.572.120	30.802.600	97,56	769.520	2,44
Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	81.506.000	53.151.000	65,21	28.355.0001	34,79
Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada skpd	25.323.120	25.302.600	99,92	20.520	0,08
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	128.500.000	127.878.700	99,52	621.300	0,48
Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	128.500.000	127.878.700	99,52	621.300	0,48
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.008.720	189.461.870	91,52	17.546.850	8,48
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	1.620.000	1.620.000	100	0	0
Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	62.850.000	46.166.270	73,45	16.683.730	16,55
Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	4.260.000	85,20	740.000	14,8
Sub Kegiatan Penyediaan jasa	137.538.720	137.415.600	99,91	123.120	0,09

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN (RP)</b>	<b>%</b>
pelayanan umum kantor					
Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	239.856.416	238.878.383	99,59	978.033	0,41
Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	151.653.500	150.676.400	99,36	977.100	0,64
Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	20.000.000	100	0	0
Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	68.202.916	68.201.983	100	933	0
<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>672.997.320</b>	<b>371.736.210</b>	<b>55,24</b>	<b>301.261.110</b>	<b>44,76</b>
Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	672.997.320	371.736.210	55,24	301.261.110	44,76
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	498.974.400	217.071.570	43,50	281.902.830	56,5
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	174.022.920	154.664.640	88,88	19.358.280	11,12
<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan</b>	<b>3.517.317.428</b>	<b>3.051.582.195</b>	<b>86,76</b>	<b>465.735.233</b>	<b>13,24</b>
Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	3.517.317.428	3.051.582.195	86,76	465.735.233	13,24
Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	3.203.062.428	2.738.527.195	85,50	464.535.233	14,5

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	116.275.000	115.075.000	98,97	1.200.000	1,03
Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	182.980.000	182.980.000	100	0	0
Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan keustimewaan urusan pertanahan	15.000.000	15.000.000	100	0	0

Sumber : DPTR, 2021

### 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Secara umum hal yang menjadi kendala dalam hal realisasi belanja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini adalah :

- 1) Kurang optimal dalam perencanaan sehingga kegiatan tidak memenuhi jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya
- 2) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM selaku pelaksana kegiatan
- 3) Wabah pandemi covid 19 yang mengakibatkan kegiatan mundur sampai dengan akhir tahun atau bahkan direncanakan kembali tahun depan
- 4) Perubahan atas tatanan kerja, implementasi peraturan-peraturan baru dan penerapan aplikasi berbasis web

## **Bab IV. Kebijakan Akuntansi**

---

### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai perangkat daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

a. Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara

pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarsasi fisik (*stock opname*).

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah:

- Tanah
- Gedung dan bangunan
- Aset tetap lainnya
- Akumulasi Penyusutan
- Peralatan dan mesin
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Konstruksi dalam Pengerjaan

e. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- Aset Tak Berwujud
- Aset Tetap Lain-lain
- Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

f. Kewajiban

Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga
- Utang bunga
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

g. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan.

## Bab. V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

### 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Belanja Daerah dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan tujuan melayani kepentingan umum dan masyarakat yang terakomodir dalam bentuk belanja kebutuhan rutin perkantoran maupun program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah maka Belanja perangkat daerah dibagi atas Belanja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2020 dan 2021

BELANJA	TA 2020			TA 2021		
	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>9.573.827.701</b>	<b>8.481.208.492</b>	<b>88,59</b>	<b>10.694.443.465</b>	<b>9.425.209.206</b>	<b>88,13</b>
Belanja pegawai	3.614.156.689	3.167.493.797	87,64	4.994.488.637	4.557.236.698	91,25
Belanja barang dan jasa	5.959.671.012	5.313.714.695	89,16	5.699.954.828	4.867.972.508	85,40
<b>Belanja Modal</b>	<b>17.825.000</b>	<b>17.825.000</b>	<b>100</b>	<b>147.100.000</b>	<b>146.478.700</b>	<b>99,58</b>
Belanja modal	17.825.000	17.825.000	100	147.100.000	146.478.700	99,58
	<b>9.591.652.701</b>	<b>8.499.033.492</b>	<b>88,61</b>	<b>10.841.543.465</b>	<b>9.571.687.906</b>	<b>88,29</b>

Sumber : DPTR, 2021

Dari besaran pagu belanja 2021 terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 1.249.890.764 atau 13,03% dibanding tahun 2020 dengan realisasi yang mengalami penurunan sebesar 0,36 %.



### 5.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai merupakan elemen Belanja operasional yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan, honorarium PNS dan honorarium Non PNS. Capaian belanja pegawai tahun anggaran 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.133.925.500,00</b>	<b>2.746.299.850,00</b>	<b>87,63</b>	<b>387.625.650</b>	<b>12,37</b>
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.237.875.100,00	2.065.277.120,00	92,29	172.597.980	7,71
Tunjangan Keluarga	221.444.030,00	171.785.182,00	77,57	49.658.848	22,43
Tunjangan Jabatan	206.757.250,00	165.310.000,00	79,95	41.447.250	20,05
Tunjangan Fungsional	26.600.000,00	0,00	0,00	26.600.000	100
Tunjangan Fungsional Umum	81.509.500,00	66.015.000,00	80,99	15.494.500	19,01
Belanja Tunjangan Beras ASN	110.802.600,00	108.702.420,00	98,10	2.100.180	1,9
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.909.964,00	9.315.039,00	31,14	20.594.925	68,86
Belanja Pembulatan Gaji ASN	595.405,00	29.052,00	4,88	566.353	95,12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	180.887.120,00	142.936.647,00	79,02	37.950.473	20,98
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.730.900,00	4.232.311,00	73,85	1.498.589	26,15
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.192.701,00	12.697.079,00	73,85	4.495.622	26,15
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.620.930,00	0,00	0,00	14.620.930	100
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.748.153.137,00	1.698.526.848,00	97,16	49.626.289	2,84
<b>Belanja Honorarium</b>	<b>112.410.000,00</b>	<b>112.410.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	111.110.000,00	111.110.000,00	100	0	0

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	100	0	0
	<b>4.994.488.637</b>	<b>4.557.236.698</b>	<b>91,25</b>	<b>437.251.939</b>	<b>8,75</b>

Sumber : DPTR, 2021

Belanja barang dan jasa disediakan untuk mengakomodir kebutuhan/biaya yang diperlukan bagi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersifat pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan maupun meningkatkan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat. Realisasi atas belanja barang dan jasa tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
<b>Belanja Barang</b>	<b>884.769.540</b>	<b>842.185.698</b>	<b>95,19</b>	<b>42.583.842</b>	<b>4,81</b>
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>884.769.540</b>	<b>842.185.698</b>	<b>95,19</b>	<b>42.583.842</b>	<b>4,81</b>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.166.130	18.166.123	100,00	7	0
Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.864.000	9.864.000	100,00	0	0
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.991.500	107.687.500	97,02	3.304.000	2,98
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	274.000	274.000	100,00	0	0
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	907.500	900.000	99,17	7.500	0,83
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	238.178.460	227.122.175	95,36	11.056.285	4,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.515.700	83.999.650	93,84	5.516.050	6,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.802.500	38.502.500	96,73	1.300.000	3,27
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	99.424.250	95.589.250	96,14	3.835.000	3,86
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.870.000	3.530.000	60,14	2.340.000	39,86
Belanja Alat/Bahan untuk	37.741.000	37.741.000	100,00	0	0

<b>KELOMPOK BELANJA</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>%</b>
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.672.000	15.862.000	73,19	5.810.000	26,81
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	186.042.500	176.627.500	94,94	9.415.000	5,06
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.000.000	2.000.000	100,00	0	0
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.320.000	19.320.000	100,00	0	0
<b>Belanja Jasa</b>	<b>3.131.912.128</b>	<b>2.795.983.410</b>	<b>89,27</b>	<b>335.928.718</b>	<b>10,73</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.690.201.428</b>	<b>2.358.114.910</b>	<b>87,66</b>	<b>332.086.518</b>	<b>12,34</b>
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.850.000	95.850.000	100,00	0	0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	864.600.000	786.300.000	90,94	78.300.000	9,06
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	420.700.000	418.600.000	99,50	2.100.000	0,50
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000	25.200.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.200.000	25.200.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Tenaga Ahli	145.000.000	145.000.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	91.200.000	91.200.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Tenaga Supir	45.600.000	45.600.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.800.000	28.800.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	7.500.000	7.500.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	43.740.000	43.740.000	100,00	0	0
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	17.850.000	17.600.000	98,60	250.000	1,40
Belanja Tagihan Telepon	300.000	0	0	300.000	100,00

<b>KELOMPOK BELANJA</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>%</b>
Belanja Tagihan Listrik	48.000.000	33.024.838	68,80	14.975.162	31,20
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000	1.200.000	100,00	0	0
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.550.000	13.141.432	90,32	1.408.568	9,68
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	814.911.428	580.158.640	71,19	234.752.788	28,81
<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.566.000</b>	<b>83,33</b>	<b>313.200</b>	<b>16,67</b>
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	835.200	696.000	83,33	139.200	16,67
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.044.000	870.000	83,33	174.000	16,67
<b>Belanja Sewa Tanah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000	50.000.000	100,00	0	0
<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.700.000	5.700.000	100,00	0	0
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.050.000	4.050.000	100,00	0	0
<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>18.250.000</b>	<b>18.250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.250.000	18.250.000	100,00	0	0
<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>291.831.500</b>	<b>290.603.500</b>	<b>99,58</b>	<b>1.228.000</b>	<b>0,42</b>
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	243.831.500	243.831.500	100,00	0	0
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	48.000.000	46.772.000	97,44	1.228.000	2,56
<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>70.000.000</b>	<b>67.699.000</b>	<b>96,71</b>	<b>2.301.000</b>	<b>3,29</b>
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-	70.000.000	67.699.000	96,71	2.301.000	3,29

<b>KELOMPOK BELANJA</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>%</b>
Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata					
<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>57.230.000</b>	<b>57.230.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.405.000	31.405.000	100,00	0	0
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.825.000	5.825.000	00,00	0	0
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.450.000	4.450.000	100,00	0	0
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.900.000	6.900.000	100,00	0	0
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.650.000	3.650.000	100,00	0	0
<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>11.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.550.000</b>	<b>100,00</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	11.550.000	0	0	11.550.000	100,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>104.278.000</b>	<b>74.041.000</b>	<b>71,00</b>	<b>30.237.000</b>	<b>29,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.536.000	700.000	15,43	3.836.000	84,57
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	29.952.000	10.576.000	35,31	19.376.000	64,69
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.790.000	62.765.000	89,93	7.025.000	10,07
<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.510.215.160</b>	<b>1.098.532.400</b>	<b>72,74</b>	<b>411.682.760</b>	<b>27,26</b>

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.425.090.000	1.037.500.000	72,80	387.590.000	27,20
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	85.125.160	61.032.400	71,70	24.092.760	28,30
<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>5.699.954.828</b>	<b>4.867.972.508</b>	<b>85,40</b>	<b>831.982.320</b>	<b>14,60</b>

Sumber : DPTR, 2021

### 5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan Belanja yang digunakan untuk pengadaan barang daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun anggaran, yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, jalan irigasi jaringan, bangunan, dan aset lainnya yang dikategorikan menambah aset daerah. Pada Tahun 2021 belanja modal yang di anggarkan adalah belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal pengadaan aset tetap lainnya. Realisasi secara rinci disajikan dalam table berikut:

Tabel 7. Realisasi Belanja Modal TA 2021

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Modal alat kantor lainnya : Monitor LCD	10.000.000	9.500.000	95,00	500.000	5,00
Modal alat studi lainnya : tripod camera, web camera	2.900.000	2.900.000	100,00	0	0,00
Modal personal computer : PC	90.000.000	89.899.700	99,89	100.300	0,11
Modal computer unit lainnya : notebook	9.000.000	8.979.000	99,77	21.000	0,23
Modal peralatan jaringan : CCTV	7.000.000	7.000.000	100,00	0	0,00
Modal peralatan computer lainnya : printer	24.600.000	24.600.000	100,00	0	0,00
Modal alat rumah tangga lainnya (home use) : gordyn	3.600.000	3.600.000	100,00	0	0,00
<b>Belanja modal</b>	<b>147.100.000</b>	<b>146.478.700</b>	<b>99,58</b>	<b>621.300</b>	<b>0,42</b>

Sumber : DPTR, 2021

## 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

### 5.2.1. Beban

Jumlah beban Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Beban Operasi Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>4.557.236.698,00</b>
	Beban Gaji Pokok PNS	2.065.277.120,00
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	171.785.182,00
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	165.310.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	66.015.000,00
	Beban Tunjangan Beras PNS	108.702.420,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.315.039,00
	Beban Pembulatan Gaji PNS	29.052,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	142.936.647,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.232.311,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	12.697.079,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.698.526.848,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	111.110.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.300.000,00
<b>2</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>4.865.723.627,00</b>
	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>843.420.198,00</b>
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.166.123,00
	Beban Bahan-Bahan Kimia	9.864.000,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.687.500,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	274.000,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	900.000,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	227.529.175,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	83.999.650,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.215.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.589.250,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.530.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	37.855.500,00

No	Uraian	Jumlah
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.862.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	176.627.500,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.320.000,00
	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>2.354.631.529,00</b>
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.850.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	786.300.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	418.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	145.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	91.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Supir	45.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.800.000,00
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	7.500.000,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	43.740.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	17.600.000,00
	Beban Tagihan Listrik	29.609.957,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.072.932,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	580.158.640,00
	<b>Beban Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>1.566.000,00</b>
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	696.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	870.000,00
	<b>Beban Sewa Tanah</b>	<b>50.000.000,00</b>
	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00
	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>9.750.000,00</b>
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.700.000,00
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.050.000,00
	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>18.250.000,00</b>
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.250.000,00
	<b>Beban Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>290.603.500,00</b>
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	243.831.500,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	46.772.000,00
	<b>Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>67.699.000,00</b>
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	67.699.000,00
	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>57.230.000,00</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	31.405.000,00



No	Uraian	Jumlah
	Kendaraan Bermotor Penumpang	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.825.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.450.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.900.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.650.000,00
	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>	<b>74.041.000,00</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Tetap	10.576.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.765.000,00
	<b>Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.098.532.400,00</b>
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.037.500.000,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	61.032.400,00
<b>3</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>295.846.389,89</b>
	Beban Penyusutan alat angkutan darat bermotor lainnya	295.846.389,89
<b>4</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Peralatan</b>	<b>75.055.610,70</b>
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	75.055.610,70
	<b>Jumlah</b>	<b>9.793.862.325,59</b>

Sumber : DPTR, 2021

Surplus / Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban – LO. Nilai tersebut di atas bernilai negatif / defisit disebabkan tidak adanya Pendapatan – LO sedangkan terdapat Beban – LO sebesar Rp9.793.862.325,59.

### 5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Nilai ekuitas akhir merupakan hasil akhir dari nilai saldo awal ekuitas, adanya surplus / defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi mendasar dengan perincian sebagai berikut:

- Ekuitas awal Rp 2.594.528.548,20
- Defisit LO Rp (9.793.862.325,59)

- Aset / Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp 9.571.687.906,00
- Dampak kumulatif perubahan kebijakan / Kesalahan mendasar	Rp (6.650.508,00) -----
- Ekuitas Akhir	Rp 2.365.703.620,61

#### 5.4. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.1. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.366.671.620,61 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Aset DPTR per 31 Desember 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lancar	55.761.000,00	526.500,00	(1.761.000,00)
2	Aset Tetap	2.543.218.929,20	2.366.145.120,61	146.478.700,00
3	Aset lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.598.979.929,20</b>	<b>2.366.671.620,61</b>	<b>(232.308.308,59)</b>

Sumber : DPTR, 2021

##### 5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 526.500,00 yang merupakan nilai persediaan akhir disajikan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021

Uraian	2020	2021	Kenaikan / Pengurangan
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penegeluaran	0,00	0,00	0,00

Uraian	2020	2021	Kenaikan /Pengurangan
Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	0,00
Kas di bendahara BOS	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
Piutang lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Belanja dibayar di muka	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)
Persediaan	1.761.000,00	526.500,00	(1.234.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>55.761.000,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>(55.234.500,00)</b>

Sumber : DPTR, 2021

Pengelolaan persediaan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dimana persediaan pertama yang masuk akan diperlakukan sebagai persediaan pertama yang dikeluarkan. Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dimana nilai persediaan akhir di neraca ditentukan dengan cara penghitungan fisik persediaan (*stok opname*) pada akhir periode yaitu per 31 Desember.

Tabel 11. Saldo persediaan per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	2021	Selisih
1	Persediaan kertas dan cover	0,00	391.000,00	391.000
2	Persediaan perabot kantor	0,00	135.500,00	135.500
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>526.500,00</b>

Sumber : DPTR, 2021

#### 5.4.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perbandingan nilai aset tetap disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	2021	Penambahan/ Pengurangan
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.760.125.137,00	2.906.603.837,00	146.478.700,00
3	Gedung dan Bangunan	2.234.706.150,00	2.281.812.785,00	47.106.635,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.242.500,00	3.485.357,00	242.857,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.998.073.787,00</b>	<b>5.191.901.979,00</b>	<b>193.828.192,00</b>

Sumber : DPTR, 2021

Nilai Aset Tetap tahun 2021 diperoleh dari mutasi tambah dan mutasi hapus. Mutasi tambah berasal dari kegiatan pengadaan belanja modal tahun 2021 dan mutasi dari OPD lain yang kemudian diakui sebagai aset DPTR. Sedangkan mutasi hapus berasal dari kegiatan penghapusan asset karena asset yang dimiliki dianggap telah habis masa pakainya karena rusak atau jika dilakukan pemeliharaan memakan biaya yang tidak efisien atau karena sebab lain. Penambahan dan pengurangan nilai asset digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	Mutasi		2021
			Tambah	Hapus	
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2.760.125.137	146.478.700	0	2.906.603.837
3	Gedung dan Bangunan	2.234.706.150	47.106.635	0	2.281.812.785
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	3.242.500	242.857	0	3.485.357
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4.998.073.787</b>	<b>193.828.192</b>	<b>0</b>	<b>5.191.901.979</b>

Sumber : DPTR, 2021

#### 5.4.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul posisi per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 0,00 sebagai berikut:

Tabel 14. Aset Lainnya per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	2021	Penambahan/ Pengurangan
1	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00
2	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
3	Aset tak berwujud	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
4	Akumulasi amortisasi asset tak berwujud	(11.500.000,00)	(11.500.000,00)	0,00
5	Aset lain-lain	0,00	0,00	0,00
6	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : DPTR, 2021

#### 5.4.1.4. Kewajiban

Kewajiban yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2021 merupakan berasal dari nilai Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	2021	Penambahan/ Pengurangan
1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2	Utang bunga	0,00	0,00	0,00
3	Bagian lancar utang jangka panjang	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00
5	Utang belanja	4.451.381,00	968.000,00	(3.483.381,00)
6	Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Utang Uang Jaminan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.451.381,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>(3.483.381,00)</b>

Sumber : DPTR, 2021

#### 5.4.1.5. Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp 2.366.671.620,61.

## Bab VI. Penjelasan Informasi Non Keuangan

---

### 6.1. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti mandala Sarta Tata Sasana*) di dalamnya termuat kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berlokasi di Kompleks Pemda II Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul DI Yogyakarta 55714 telepon (0274) 367446.

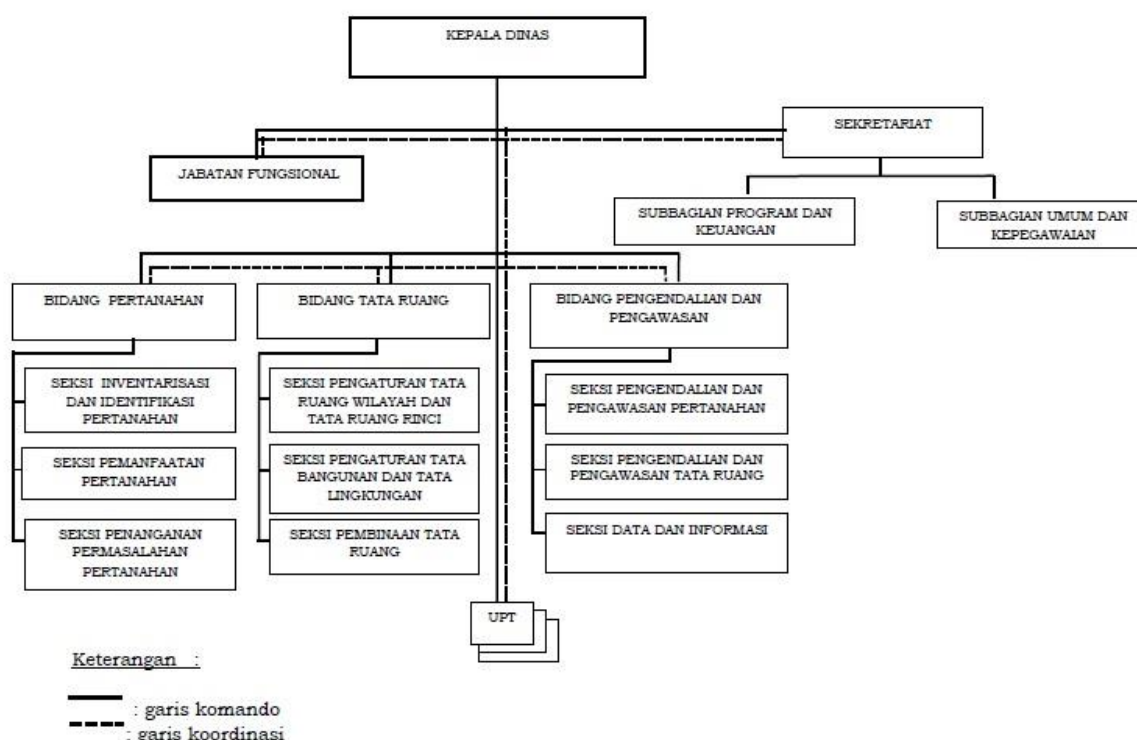
## **6.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- h. penyusunan rencana rinci tata ruang;
- i. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- j. penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
- k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- l. pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;
- m. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- n. pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- o. fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
- p. penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- q. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;

- r. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- s. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- t. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- u. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- v. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### 6.3. Struktur Organisasi



Sumber : Perda Bantul Nomor 8 Tahun 2019

### 6.4. Visi dan Misi

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terkait



erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana".

Keterkaitan antara visi, misi kabupaten Bantul dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan sebagai berikut:

Tabel 16. Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran

<b>VISI</b> <b>Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</b>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran / IKU</b>
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
			2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
			3. Cakupan Sertifikasi Tanah(%)

Sumber : Renstra DPTR 2017-2021

### 6.5. Keragaman Sumber Daya Manusia

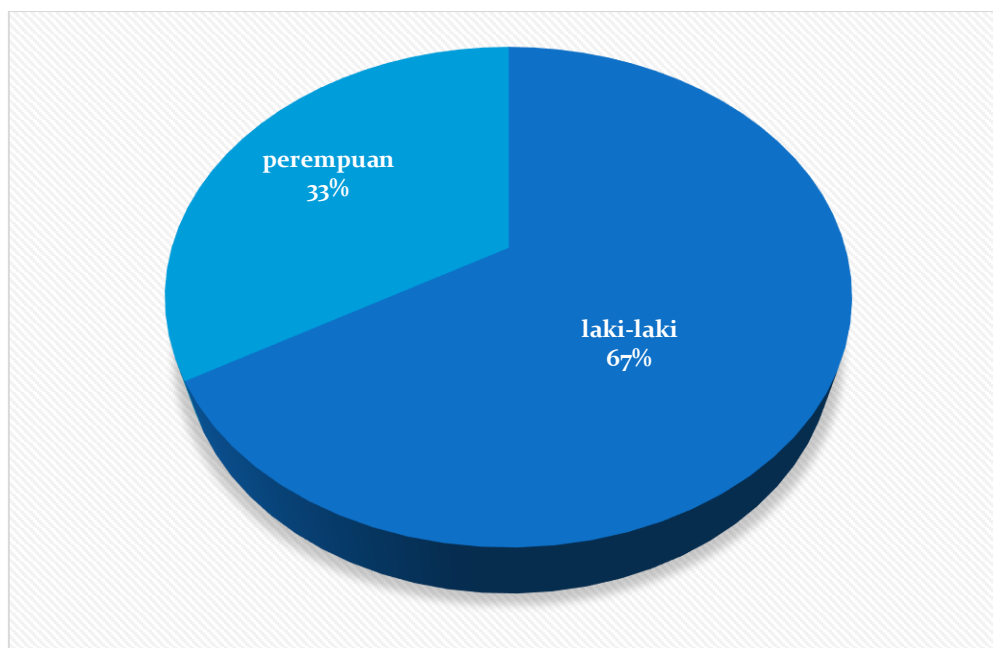
Sumber daya manusai dalam penyelenggaraan urusan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan dalam table berikut:

Tabel 17. Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin per 31 Desember 2021

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	28
2	Perempuan	14
		<b>42</b>

Sumber : DPTR, 2021

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan sebagai berikut.



Sumber : DPTR, 2021

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

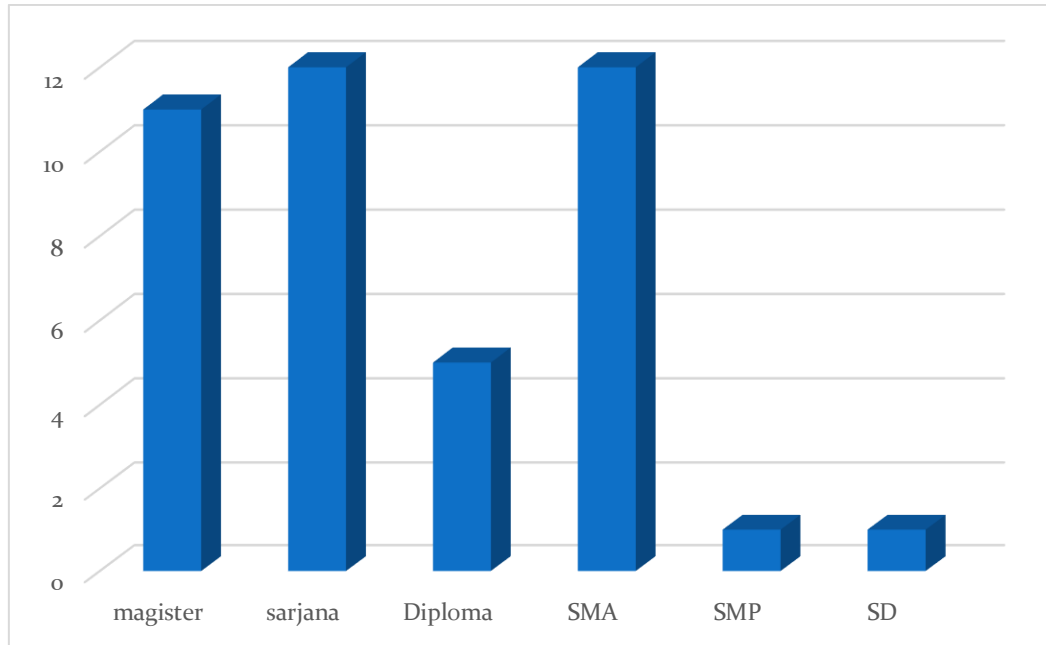
Tabel 18. Data Pegawai Berdasar Jenis Pendidikan per 31 Desember 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Magister	11
2	Sarjana / DIV	12
3	Diploma	5
4	SLTA	12
5	SLTP	1
6	SD	1
		<b>42</b>

Sumber : DPTR, 2021

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 26,19% dan untuk pegawai

berpendidikan sarjana sebesar 28,57%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : DPTR, 2021

## Bab VII. Penutup

---

Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 secara keseluruhan.